



## Studi Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Gereja ala Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak Toba

Nur Alim Bahri<sup>1</sup>, Haliah<sup>2</sup>, Nirwana<sup>3</sup>, Syamsuddin<sup>4</sup>, Andi Kusumawati<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin<sup>2345</sup>

Surel: [alimbahrinur.713@gmail.com](mailto:alimbahrinur.713@gmail.com), [haliah@fe.unhas.ac.id](mailto:haliah@fe.unhas.ac.id),  
[nirwana\\_ni@yahoo.com](mailto:nirwana_ni@yahoo.com), [syamsuddinfeb.uh@gmail.com](mailto:syamsuddinfeb.uh@gmail.com),  
[andiuma88@gmail.com](mailto:andiuma88@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

JIAP Volume X  
Nomor 1  
Halaman 97-109  
Samata,  
Januari-Juni 2024

ISSN 2441-3017  
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:  
**21 Mei 2022**  
Tanggal Revisi:  
**23 Oktober 2020**  
Tanggal Diterima:  
**30 Juni 2022**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk internalisasi nilai *dalihan na tolu* dalam membangun akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan Gereja. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan analisis data yang digunakan analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *dalihan na tolu* dalam membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Gereja sudah dilakukan dengan baik yang mana segala sesuatu dilakukan demi kepentingan organisasi dengan cara melakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan dengan berupa laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran kas, dengan memberikan dan menyediakan laporan keuangan mingguan yang berisikan info atau penerimaan dan pengeluaran kas Gereja kepada jemaat. Implikasi teoritis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat menjadi acuan dalam perkembangan akuntansi sektor publik khususnya pada organisasi nirlaba dengan penerapan budaya lokal. Implikasi praktisnya ialah bahwa penelitian memberikan khasanah lokal dalam penelitian akuntansi.

**Kata Kunci:** *Dalihan Na Tolu, Tranparansi, Akuntanbilitas, Keuangan Gereja*

*This research aims to analyze the form of internalization of the value of dalihan na tolu in building accountability and openness in Church financial management. The research uses qualitative research with an ethnographic approach. The data sources used are primary and secondary data, and data analysis uses domain analysis, taxonomy, components and cultural themes. The results of the research show that the value of dalihan na tolu in building accountability and transparency in financial management in the Church has been carried out well, where everything is done for the benefit of the organization by holding accountability to interested parties in the form of financial reports, cash receipts and disbursements, by providing and provide weekly financial reports containing information or Church cash receipts and expenditures to the congregation. The theoretical implications of this research can become a reference in the development of public sector accounting, especially in non-profit organizations with the application of local culture. The practical implication is that the research provides a local repertoire in accounting research.*

**Keyword:** *Dalihan Na Tolu, Transparency, Accountability, Church Finances*

**Copyright:** Bahri, Nur Alim, Haliah, Nirwana, Syamsuddin dan Andi Kusumawati. (2024). Studi Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Gereja ala Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak Toba. Vol. 10 No. 1. <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48147>

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan di era globalisasi sangat penting untuk sektor publik dan komersial saat membuat penilaian tentang uang dan ekonomi. Dalam praktiknya, organisasi sektor publik di Indonesia merupakan kelompok yang menggunakan keuangan publik. Jenis organisasi sektor publik dikenal antara lain organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, organisasi yayasan, organisasi pendidikan termasuk sekolah, organisasi kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit, dan yang terakhir organisasi tempat peribadatan termasuk Masjid, Gereja, Wihara, dan Pura (Bastian, 2019). Akuntansi sektor publik tergolong dalam dua bagian yaitu organisasi laba dan organisasi nirlaba. Sektor akuntansi publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik untuk salah satu pertanggungjawaban kepada publik, lembaga publik dituntut pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi (Laoli, 2019).

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tujuannya bukan mencari laba melainkan mementingkan sumber daya sebagai aset yang harus diutamakan, segala kegiatan yang dilakukan berasal dari operasi sumber daya. Dana yang diterima organisasi nirlaba yaitu seperti sumbangan dari anggota baik dari luar anggota yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Salah satu contoh organisasi nirlaba adalah di bidang keagamaan seperti Gereja. Gereja merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang termasuk dalam bidang keagamaan, kewajiban setiap Gereja diharuskan dapat mengelola sumber dayanya untuk mencapai tujuan dan pelayanan, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Mengingat sejarah menunjukkan terdapat kasus penyelewengan dana dan kecurangan di Gereja, pengelolaan keuangan rentan akan kecurangan dari berbagai pihak, misalnya sumber dana organisasi nirlaba, termasuk dalam pengelolaan keuangan Gereja (Anto et al., 2021). Keuangan atau dana Gereja kadang kala dianggap sebagai dana sosial yang dipakai habis dalam pelayanan akibatnya dalam pengelolaannya terkesan diabaikan yang dapat menimbulkan kecurangan. Menurut Holle (2019) Gereja merupakan organisasi yang memudahkan adanya korupsi, misalnya sumbangan dari donatur yang tidak diserahkan kepada bendahara, korupsi uang persembahan untuk kepentingan pribadi, tidak adanya laporan keuangan yang benar dan manajemen yang kurang baik, dari permasalahan ini sering kali pejabat Gereja tidak menanggapi dengan serius bahkan adanya kesan ditutupi dan dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas. Akuntabilitas Gereja seharusnya melakukan pencatatan laporan keuangan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Akan tetapi beberapa Gereja di Indonesia belum sepenuhnya memerhatikan pelaporan keuangan dan bahkan terkesan tertutup bagi pihak eksternal (Marindakasemetan, 2015).

Dari fenomena ini, maka pemakaian keuangan Gereja harus terperinci dengan jelas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Permasalahan keuangan merupakan juga masalah yang sensitif karena harus hati-hati dalam menangani setiap permasalahan untuk menghindari

hal yang merusak keutuhan dari Gereja itu sendiri. Pengelolaan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam standar akuntansi keuangan, yaitu pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 45 tahun 2009 hingga revisi tahun 2011 dan ISAK 35 berlaku 1 Januari 2020 dengan adanya standar keuangan ISAK 35 semua organisasi nirlaba harus menyajikan laporan menurut standar yang berlaku (Melia, 2022). Adanya standar akuntansi ini tentunya harus menyajikan laporan keuangan menurut ketentuan yang berlaku, supaya pelaporan keuangan dapat berjalan dengan rapi dan menjaga akuntabilitas dan transparansi kepada pihak pengguna. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami, saling terkait satu sama lain, serta memiliki kemampuan untuk dibandingkan dengan organisasi lain sehingga tercipta responsibilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Lembaga nonprofit. Dengan adanya responsibilitas dan keterbukaan tersebut, masyarakat atau donatur dapat memperoleh informasi keuangan yang diperlukan.

Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi nirlaba dapat dipengaruhi oleh nilai kebudayaan lokal dari organisasi itu sendiri. Seperti penelitian Panggabean & Hariwibowo (2021) yang menginternalisasikan nilai budaya yang dianut oleh organisasi akan dapat lebih diterima oleh anggota organisasi karena nilai-nilai tradisi telah hidup dan berkembang pada masyarakat setempat. Jika organisasi mampu menerapkan nilai budaya lokal maka membangun akuntabilitas dan transparansi keuangan dapat diaplikasikan secara efektif. Berbagai jenis kecurangan pengelolaan finansial masih bisa terjadi karena bentuk situasi atau peluang. Akan tetapi dalam praktiknya mengurangi kecurangan pengelolaan finansial dapat menekankan melalui beberapa cara seperti penelitian Diantari & Wirawati (2019) yang menyatakan bahwa implemmentasi kearifan lokal *menyama braya* dalam pelaksanaan prinsip responsibilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan atau mengikat tingkah laku *krama* agar mampu mengelola finansial organisasi berdasarkan good government. Dari penelitian ini dapat dikaitkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud dengan menerapkan budaya lokal pada masyarakat.

Penelitian ini akan menginternalisasikan budaya dalihan na tolu dengan pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Alasan pengambilan falsafah budaya ini dikarenakan adanya kedekatan antara Budaya Batak Toba dan juga agama Kristen. Tujuan dari internalisasi ini ialah pada bagaimana meningkatkan nilai akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan gereja berdasarkan budaya dalihan na tolu.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam untuk mencerminkan aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian (Sugiyono, 2010). Sedangkan Etnografi merupakan sebuah metode penelitian

kualitatif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data yang berfokus pada interaksi sosial, bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang budaya atau kelompok yang diteliti (Emerson et al., 2011).

Etnografi fokus pada studi tentang budaya kelompok masyarakat. Kebudayaan sebagai objek dari penelitian etnografi yaitu pola perilaku yang terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti budaya atau gaya hidup masyarakat. Penggunaan metode ini digunakan mengungkapkan bagaimana budaya mempengaruhi pembentukan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan. Menganalisis data dari sudut pandang untuk melihat bagaimana dinamika sosial membentuk pemahaman masyarakat.

Objek dari penelitian ini adalah Gereja HKBP Ressort Bojong Menteng Distrik XIX Bekasi yang terletak di Jalan Kemuning III No.119 RT 03 RW 05 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi yang dimana merupakan organisasi nirlaba yang tepatnya terletak di Bekasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari pendeta, bendahara jemaat, sekretaris, anggota jemaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, menurut Spradley (1980) maka analisis data dalam etnografi yang digunakan adalah analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemaknaan Budaya Dalihan Na Tolu Pada Gereja HKBP Bojong Menteng

Organisasi memiliki suatu sistem kebijakan untuk mencapai tujuan, tentunya organisasi memegang prinsip suatu budaya. Budaya merupakan suatu hal kebiasaan atau kepercayaan suatu individu dalam menuju pemahaman yang baik. Gereja HKBP Bojong Menteng dengan mayoritas Suku Batak yang tentunya memiliki budaya yang dipegang teguh.

Dalihan na tolu memiliki unsur yang saling berhubungan yang mempengaruhi sistem kekerabatan di dalam masyarakat Batak yang saling berkaitan antara ketiga unsur di dalam masyarakat Batak (Armawi, 2008; Lubis & Joubagio, 2019). Setiap aktivitas individu maupun dengan individu yang lain baik juga antar kelompok dengan kelompok yang lain akan berjalan baik jika dijalankan berdasarkan falsafah dalihan na tolu, yang dimaksud ketiga unsur adalah somba marhula-hula, manat mardogan tubu, dan elek marboru. Ketiga unsur ini akan terlibat dan memiliki sistem timbal balik yang terwujud antara masyarakat Batak Toba. Dari dalihan na tolu ini dapat dikatakan merupakan produk budaya batak yang mengatur sistem perilaku dan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Seperti pemaknaan berdasarkan pemahaman pemimpin Gereja yang menyatakan.

“kalau menurut saya *dalihan na tolu* itu artinya *manat mardongan tubu, elek marboru, somba marhula-hula*, kalau dimaknai dan dihubungkan ke masyarakat atau individu bisa diartikan yaitu kasihilah sesama mu manusia, *haholongi ma dongan mu jolma dosson dirim*, kan muter-muter lagi dia, karena *dang sae torus halak nagabe hula-hula, molo burju ibana marhula-hula, disada tikki kan gabe hula-*

*hula do ibana, molo dang dengen ibana marboru suatu ketika pas ada ulaon ibana posisi dihula-hula bah dang gabe sobba akka boruna tuibana jadi marputar doi, itu dikaitkan dengan pesan Tuhan kita haholongi ma dongan mu jolma dosson dirim, bertanggungjawab maho tuhula-hulam, adil ma tudongan tubumu, dohot ikkon mengayomi maho tu boru mu”*

Berdasarkan pernyataan informan, sebagai manusia atau individu harus memiliki perilaku yang memiliki rasa empati, mampu mengasihi satu sama lain, dimana informan mengartikan bahwa *dalihan na tolu* memiliki tiga dasar penopang atau tiga unsur yaitu *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*. Ketiga ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang mana ketiga dasar ini memiliki nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan dan perilaku yaitu sebagai berikut:

#### 1. Somba Marhula-Hula

*Somba marhula-hula* adalah bagian dari *dalihan na tolu* yang jika dikaitkan dengan kekerabatan *hula-hula* adalah keluarga dari pihak istri dan di maknai dengan menghormati, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi. Masyarakat *batak toba* meyakini sebagai orang *batak* kita harus menerapkan *dalihan na tolu* di dalam perilaku kehidupan sehari-hari salah satunya *hula-hula*, sebagai masyarakat *batak Toba* memaknai *hula-hula* harus dihormati dan harus memiliki rasa bertanggung jawab terhadap *hula-hula*. Seperti pernyataan pemimpin Gereja.

(*Hula-hula* merupakan pihak dari istri, sebagai individu yang mempunyai latar belakang suku *batak toba*, *hula-hula* ini penting, jika kita tidak menjalankan sistem *dalihan na tolu*, kehidupan kita seperti nya tidak baik, mengenai *hula-hula* kita diajarkan untuk menghormati *hula-hula*, dan bertanggungjawab terhadap *hula-hula*, ibaratkan jika kita bekerja di dalam masyarakat *Batak Toba*, tentunya akan bertemu orang *Batak*, tidak bisa di pungkiri kita tidak bertemu dengan *hula-hula*, berangkat dari hal ini kita bisa mengutip terhadap diri kita sebagai manusia harus memiliki rasa bertanggungjawab di dalam tugas kita berangkat dari hal ini kita sudah menghormati *hula-hula*)

Dari pemahaman dan pemaknaan *hula-hula* menurut pemimpin Gereja, *hula-hula* di maknai sebagai pertanggungjawaban, berangkat dari etnis kekerabatan suku *Batak Toba* yang mana harus menghormati *hula-hula*, dari hal ini masyarakat *Batak Toba* merasa bertanggungjawab akan tugas dan pekerjaannya.

#### 2. Manat mardongan tubu

Salah satu dasar dari *dalihan na tolu* adalah *manat mardongan tubu* dan merupakan juga tata pola yang mengatur kekerabatan dan perbuatan atau tindakan kita sehari-hari, terlihat dari tutur sapa baik yang artinya setiap individu orang *batak* yang bertemu dengan orang *Batak* pasti akan bertanya mengenai marga dan asal usul untuk menentukan posisi sosialnya, misalnya ketika orang *Batak* bertemu dengan teman semarga maka sebagai orang *Batak* akan menempatkan dirinya sebagai saudara atau teman sekandung dan akan berusaha memperlakukan dengan baik layaknya

saudara kandung. Dongan tubu ini harus kita lakukan layaknya saudara kandung seperti secara nilai dongan tubu secara umum adalah memiliki rasa adil, saling menopang, dan saling tolong menolong. Seperti pemaparan bendahara Gereja yang menyatakan.

*Manat mardongan tubu* artinya teman semarga, jika diambil kepada tugas saya harus memiliki rasa adil dan saling menopang, istilahnya dalam pekerjaan harus memiliki rasa adil dan saling menopang karena kita semua orang Batak, tentunya pastinya ada teman semarga kita, maka dari hal ini jika kita melakukan tugas kita harus lah adil dan saling menopang antara saudara kita yang kesusahan, saya memiliki tugas di bagian keuangan, tentunya saya harus mampu berbuat adil dan harus mampu saling menopang, contohnya jika ada saudara kita yang mengalami kesulitan dalam keuangan atau sakit, maka saya harus menopang dengan melakukan penganggaran untuk pengobatannya.

Berdasarkan hasil wawancara etnografer terhadap beberapa informan di Gereja HKBP dapat disimpulkan bahwa manat mardongan dimaknai sebagai teman semarga atau saudara dan memiliki nilai-nilai keadilan dan saling menopang.

### 3. *Elek marboru*

*Elek marboru* merupakan pihak dari laki-laki antara *hula-hula* dengan *boru* yang sangat besar kaitannya. Bagi setiap orang Batak, *hula-hula* merupakan orang yang memberikan berkat bagi pihak *boru* karena *hula-hula* dianggap sebagai Tuhan yang terlihat, *hula-hula* atau pihak dari keluarga istri diposisikan sebagai wakil Tuhan, yang mana setiap doa dan restu dari pihak *hula-hula* sangat berpengaruh terhadap kehidupan *boru*. Oleh karena itu *boru* harus selalu membantu *hula-hula* nya dalam segala aspek kehidupan, akan tetapi bukan berarti *boru* diperlakukan dengan seenaknya, *boru* juga harus diperlakukan dengan baik, *elek* dalam arti harus dibujuk diambil hatinya. Secara umum *hula-hula* harus mengayomi, melindungi dan mengasahi *boru* nya. Seperti pemaparan pemimpin Gereja.

*Elek marboru* artinya dari pihak laki-laki, menurut saya dimaknai bahwa kita sebagai *hula-hula* harus mengayomi, mengasahi dan melindungi pihak *boru* terlebih jika didalam tugas saya, suatu saat dalam suatu organisasi pasti ada pihak *boru* berarti jika dikaitkan dengan akuntabilitas dan transparansi, maka haruslah kita mengayomi jemaat karena suatu saat akan ada *boru* didalam organisasi Gereja, jadi pasti ada rasa malu jika keuangan tidak akuntabel dan transparan ke pada *boru*, maka berangkat dari hal ini nilai yang diambil adalah mengayomi.

Berdasarkan pemahaman pemaparan pemimpin gereja bahwa *elek marboru* di maknai sebagai pihak dari laki-laki yang mana harus mengayomi pihak *boru*, dalam segi tugas atau tanggungjawab pemimpin Gereja bahwa akuntabilitas dan transparansi Gereja harus ditetapkan karena dalam kekerabatan salah satunya *elek marboru* memiliki nilai untuk mengayomi yang artinya sebagai pemimpin Gereja harus memiliki rasa tanggungjawab

akan tugas dalam mengayomi jemaat dengan akuntabel dan terbuka atas pengelolaan keuangan Gereja.

### **Pemahaman Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Gereja HKBP**

Akuntabilitas merupakan wujud dari pertanggung jawaban suatu organisasi menuju tata kelola yang baik. Pengaruh dari akuntabilitas sangat penting, dalam membangun kepercayaan anggota atau jemaat dalam suatu organisasi, pengelolaan keuangan harus dicatat dengan benar dan segala penyusunan, perencanaan, dan tata pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan terhadap anggota ataupun pengguna. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yaitu Pemimpin Gereja (Pendeta), Sekretaris, Bendahara, dan pentingnya pihak pengawasan dari anggota atau jemaat.

Pemahaman dari staf Gereja Bojong Menteng mengenai akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari suatu tugas dalam mengelola keuangan Gereja, seperti pernyataan dari bendahara:

“Yah akuntabilitas itu bisa dibilang pertanggungjawaban dari suatu tugas saya, saya kan mengelola keuangan, misalnya saya harus membuat pencatatan laporan keuangan mengenai perencanaan, anggaran, pelaksanaannya, haruslah benar dilakukan”

Akuntabilitas Gereja merupakan kewajiban Gereja dalam melakukan pertanggungjawaban, keputusan atau tindakan dalam menjalankan tugas keagamaan. Gereja sebagai badan keagamaan diharapkan dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, etika, dan integritas dalam segala aspek pelayanannya. Dalam membangun Gereja yang akuntabilitas gereja diharuskan melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel mulai dari perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Berdasarkan misi Gereja yang terakhir mengatakan bahwa gereja harus mengembangkan penatalayanan termasuk keuangan demi melaksanakan pembangunan Gereja yang baik termasuk bagaimana pertanggungjawaban laporan keuangan. Pemimpin Gereja atau bapak Pendeta mengatakan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan sudah dilakukan setiap minggu dan bulannya, baik penerimaan seperti persembahan dan pengeluaran sudah di laporkan.

Pengelolaan Gereja HKBP Bojong Menteng dalam pertanggungjawaban anggaran jemaat. Semuanya dilakukan dengan pertanggungjawaban penuh yang mana setiap anggaran harus dipertimbangkan dan harus rapat huria (rapat jemaat), karena semua apapun perencanaan yang dilakukan harus diketahui pasti oleh anggota atau jemaat, dan segala sesuatu dilakukan untuk jemaat juga, Seperti pernyataan dari pemimpin gereja bapak pendeta yang mengatakan bahwa:

“Dalam membuat anggaran yang berhak dalam mengambil keputusan yah, rapat hurialah (rapat jemaat) yang bertanggungjawab yang membuatnya, artinya konsep nya itu datang dari jemaat dan sebelumnya sudah ada program dari majelis kemudian diajukan ke majelis gereja (pengurus), kemudian majelis gereja mengkonben (menerima) semua usulan-usulan program kerja dan anggaran, baru

kemudian dibawa ke dalam rapat huria (jemaat), nah rapat itulah yang kemudian menetapkan program kerja anggaran sehingga pertanggungjawaban yah kembali kepada jemaat”

Usaha yang dilakukan pengurus Gereja dalam Penerapan akuntabilitas untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan dari jemaat sudah dilakukan. Pada hakikatnya penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba termasuk Gereja sudah diatur pada ISAK 35 dengan adanya standar keuangan ISAK 35 semua organisasi nirlaba harus menyajikan laporan menurut standar yang berlaku. Namun penerapan akuntabilitas pada Gereja HKBP terhadap laporan keuangan, masih menggunakan peraturan pencatatan dari Gereja sendiri, seperti pernyataan dari Ibu bendahara.

“Kalau untuk pertanggungjawaban dalam bentuk penyajian laporan keuangan Gereja masih menggunakan peraturan atau penyajian sendiri, belum memakai standar keuangan ISAK 35, Gereja menyajikan laporan keuangan hanya dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran. pengeluaran dan penerimaannya terbagi menjadi 3 tujuan yaitu Huria (jemaat), Pembangunan, dan Pusat”

Gereja HKBP Bojong Menteng dalam akuntabilitas sudah memahami dan menerapkan akuntabilitas sebagaimana adanya, namun dari bentuk penyajian laporan keuangan Gereja HKBP Bojong menteng belum menerapkan standar akuntansi keuangan yaitu ISAK 35. Laporan keuangan bulanan pada Gereja HKBP Bojong Menteng terdiri dari pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan dilakukan dalam bentuk kegiatan transaksi kedalam buku jurnal dan kemudian dilakukan posting sesuai kelompok seperti akun Huria, Pembangunan, dan Pusat/ Distrik. Penerimaan berupa persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur, sedangkan pengeluaran berupa biaya honor, biaya transfort, biaya operasional Gereja dan lain-lain.

#### **Pemahaman Transparansi Pengelolaan Gereja HKBP Bojong Menteng**

Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang mampu melakukan pertanggungjawaban dan keterbukaan terhadap publik. Transparansi menjamin setiap orang mempunyai hak dan kebebasan memperoleh informasi tentang pengelolaan Gereja. Informasi diperoleh berdasarkan kebebasan laporan, informasi yang dimaksud merupakan kepentingan umum yang dapat diperoleh oleh pihak yang berkepentingan secara langsung. Transparansi akan mendorong suatu organisasi atau Gereja untuk melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan yang dilakukan dan menuju pengelolaan Gereja yang baik.

Gereja dapat dipercaya dengan adanya transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Gereja memahami transparansi sebagai prinsip keterbukaan dan harus dipertanggungjawabkan baik dalam pengeluaran dan penerimaan kas segala sesuatunya dilaporkan kepada pihak jemaat ataupun yang berkepentingan seperti pernyataan dari pemimpin Gereja (Bapak Pendeta).

“Transparansi artina keterbukaan dalam pengelolaan, sudeng bisa dilihat misalnya molo adong pengeluaran seperti pembelian kebutuhan



Gereja, penggajian, biaya listrik, yah nanti bisa muncul di tinting (laporan), itulah bentuk transparan Gereja, segala sesuatunya dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan”

Begitu juga dengan pernyataan dari bendahara Gereja yang mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pengelolaan terhadap publik (jemaat).

“Transparansi itu keterbukaan yang mana dari pertanggungjawaban yang kita lakukan, harus kita terbuka terhadap jemaat, baik segala anggarannya semua kita publish”

Dari pernyataan hasil wawancara etnografer, dapat diketahui bahwa Gereja memahami transparansi sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka terhadap publik atau jemaat, keterbukaan yang dimaksud adalah informasi dari hasil pengelolaan keuangan, yang mana pengurus gereja melakukan pemberian segala informasi mengenai pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban Gereja. Pengelolaan keuangan Gereja Bojong Menteng yang transparan dilakukan beberapa upaya oleh pengurus Gereja seperti tahap dibawah ini:

#### 1. Perencanaan

Pengurus gereja melakukan perencanaan secara terbuka dengan membuka peluang terhadap jemaat untuk berpartisipasi dalam program atau rancangan perencanaan. Pengurus Gereja melakukan tahap pertama yaitu dengan melakukan pertemuan dari berbagai pihak untuk melakukan perencanaan Gereja, seperti pernyataan dari pemimpin Gereja (pendeta Gereja). Sejak dari awal perencanaan sudah melakukan bentuk transparansi dengan melakukan pertemuan terhadap pihak-pihak yang terkait termasuk jemaat.

#### 2. Penganggaran

Pengelolaan keuangan Gereja berpengaruh dalam kesejahteraan jemaat, dalam pengelolaan keuangan Gereja menetapkan penganggaran untuk kegiatan gereja. Pengurus Gereja berusaha melakukan transparansi pengelolaan keuangan termasuk dalam penganggaran, dengan melibatkan Jemaat dalam membangun pelaksanaan penganggaran Gereja. Pelaksanaan penganggaran dilakukan bersama-sama, semua kegiatan dan program-program yang berjalan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi dan segala sesuatunya dilakukan secara terbuka.

#### 3. Pelaporan

Bentuk pelaporan yang dilakukan Gereja kepada jemaat dilakukan setiap minggunya dengan memberikan lembar kegiatan yang disertai laporan-laporan pertanggungjawaban setiap minggunya. Dan Pengurus Gereja juga memberikan akses kepada jemaat agar dapat melihat laporan keuangan Gereja.

### **Kaitan Budaya *Dalihan Na Tolu* Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi**

Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari, budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan dalam waktu yang lama akan

mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat ataupun organisasi (Saputra, 2019). Hubungan organisasi dengan budaya adalah setiap organisasi tentunya menganut kebiasaan, keyakinan atau nilai-nilai suatu organisasi sehingga terciptanya budaya organisasi. Budaya organisasi adalah budaya yang mengarah kepada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya.

Keterkaitan budaya *Dalihan na tolu* dengan akuntabilitas dan transparansi yaitu pada budaya *Dalihan na tolu* yang artinya digunakan dalam kekerabatan. *Dalihan na tolu* memiliki ajaran moral yang didukung dengan kaidah menghormati, bertanggungjawab, saling menopang dan mengayomi. Kaidah moral ini akan berperan dalam setiap masyarakat ataupun jemaat untuk saling mendukung kinerja dari pengelolaan Gereja. Pengurus Gereja ataupun pengelola Gereja dapat bertanggung jawab, saling menopang, dan mengayomi dalam membangun akuntabilitas pengelolaan Gereja. Ajaran budaya Batak Toba tumbuh dan berkembang dengan ikatan kekerabatan marga dimanapun dan kapanpun.

Keterkaitan budaya dalihan na tolu untuk membangun akuntabilitas dan transparansi keuangan dapat dikaitkan antara lain:

1. Akuntabilitas keuangan

Dalam budaya dalihan na tolu, setiap anggota diharapkan untuk bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan, termasuk pengelolaan keuangan. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan keuangan Gereja, di mana para pemimpin Gereja bertanggung jawab untuk mengelola dana dan sumber daya Gereja dengan bijaksana dan bertanggungjawab. Akuntabilitas keuangan mencakup pencatatan transaksi keuangan yang akurat, pelaporan yang tepat waktu, dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan Gereja.

2. Transparansi keuangan

Budaya *dalihan na tolu* menekankan pada keterbukaan dalam berkomunikasi. Dalam konteks Gereja, transparansi keuangan berarti mengomunikasikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran Gereja kepada jemaat secara terbuka dan jelas. Transparansi mencakup memberikan laporan keuangan secara periodik kepada jemaat atau anggota Gereja agar mengetahui bagaimana dana Gereja digunakan dan dapat memahami pengelolaan keuangan Gereja dengan baik.

3. Penggunaan dana yang tepat

Budaya *dalihan na tolu* mendorong penggunaan dana secara bijaksana dan untuk kepentingan bersama. Dalam Gereja, penggunaan dana harus sesuai dengan misi dan visi Gereja serta kebutuhan jemaat pemimpin Gereja harus mengutamakan kepentingan jemaat dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Gereja, dan hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya *dalihan na tolu*.

4. Keterlibatan jemaat

Dalam budaya *dalihan na tolu* partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat dalam berbagai keputusan dihargai. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan keuangan Gereja. Para pemimpin Gereja dapat melibatkan

jemaat dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Gereja.

Secara keseluruhan, keterkaitan akuntabilitas dan transparansi dengan budaya *dalihan na tolu* menjadi pedoman yang penting dalam pengelolaan keuangan Gereja. Dengan menerapkan nilai-nilai *dalihan na tolu*, Gereja dapat membangun kepercayaan dan harmoni dalam hubungan dengan jemaat serta mewujudkan tujuan misi Gereja dengan lebih efektif.

### **Internalisasi Budaya Dalihan Na Tolu Dalam Membangun Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Gereja HKBP Bojong Menteng**

. Bagi masyarakat batak toba, falsafah *dalihan na tolu* adalah falsafah yang mengatur kemasyarakatan suku Batak Toba, mengendalikan serta menunjukkan nilai karakteristik bagaimana memperlakukan sesamanya. Dalam penerapannya, *dalihan na tolu* terdapat nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat batak Toba jika dengan benar-benar diterapkan. Pengurus Gereja HKBP Bojong Menteng menjalankan budaya *dalihan na tolu* sebagai prinsip dan dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan sosial dan menjalankan tanggung jawabnya.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh pemimpin Gereja kepada etnografer mengatakan bahwa penerapan Budaya *dalihan na tolu* diterapkan sebagai peraturan atau tata pola perilaku dalam individu masing-masing yang mengatur perilaku kehidupan. Budaya *dalihan na tolu* mengadung nilai-nilai moral yang dijadikan prinsip dalam tatanan kehidupan sehari-hari yaitu *somba marhula-hula*, *manat mardongan*, dan *elek marboru*.

Internalisasi *dalihan na tolu* diterapkan oleh seorang individu saat berada dalam organisasi atau masyarakat ketika pengurus Gereja diberi tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pengurus Gereja berpegang teguh pada aturan Gereja dan secara individu mereka juga menerapkan *dalihan na tolu* untuk mencapai tujuan dan kinerja yang baik. Budaya *dalihan na tolu* mempengaruhi sistem di dalam masyarakat batak, setiap kegiatan individu dengan individu lainnya mempengaruhi baik antar kelompok akan berjalan baik jika didasarkan pada falsafah *dalihan na tolu*.

### **KESIMPULAN**

Pada lokasi penelitian, penerapan akuntabilitas terdiri dari dua bentuk, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal dimaknai oleh pengelola bahwa pelayanan di Gereja merupakan hubungan pertanggungjawaban secara pribadi dengan Tuhan, dengan dasar pelayanan "Takut akan Tuhan" dan nilai-nilai kekristenan di dalam Alkitab. Akuntabilitas horizontal dimaknai sebagai pertanggungjawaban kepada jemaat melalui laporan keuangan yang disajikan pada Warta Jemaat setiap minggunya. Pelayanan dalam pengelolaan keuangan didasarkan pada kepentingan dan tujuan organisasi, bukan kepentingan pribadi pengelola.

Jemaat memahami akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban yang harus diberikan pengelola gereja sebagai pengguna sumber daya dan adanya akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan jemaat terhadap pengelola gereja.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah ruang lingkup penelitian seperti pada objek sehingga dapat dibandingkan untuk memaksimalkan dari penelitian dan begitu juga mengenai budaya *dalihan na tolu*. Diharapkan pula bagi peneliti selanjutnya lebih dilakukan secara mendalam dalam membangun skema penerapan nilai *dalihan na tolu* yang lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anto, H. M., Suhendri, H., & Iriani, N. I. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Pada Gereja GPDI Gloria Malang. . *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 10(1), 21–38.
- Armawi, A. (2008). Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu Dan Good Governance Dalam Birokrasi Publik. *Jurnal Filsafat*, 18(2), 157–166.
- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Diantari, N. M. A., & Wirawati, N. G. P. (2019). Pemanfaatan Awig-Awig Dalam Akuntabilitas, Transparansi, Dan Perarem Pengelolaan Keuangan Pada Kearifan Lokal Menyama Braya. . *E-JA: E Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1106–1116.
- Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (2011). *Writing ethnographic fieldnotes* (2nd ed.). University of Chicago press. .
- Holle, S. S. F. (2019). *Desain Akuntansi Organisasi Nirlaba Entitas Gereja Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Dan Pedoman Pelayanan Pengawasan Tata Kelola Perbendaharaan Gmim (Studi Kasus Pada GMIM Sion Perak Sorong Manado)* [Skripsi]. Politeknik Negeri Manado.
- Laoli, V. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 91–102.
- Lubis, M. N., & Joubagio, H. (2019). Eksistensi Dalihan Na Tolu sebagai Kearifan Lokal dan Kontribusinya dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(3), 31–38.
- Marindakasemetan, N. C. (2015). *Praktik Pelaporan Keuangan Lembaga Nirlaba (Studi Kasus Gmit Kemah Ibadat Airnona)* [Skripsi].
- Melia, Y. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Nirlaba: Literatur Review. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 103–117.

Panggabean, J. S. E. A., & Hariwibowo, I. N. (2021). Keterbukaan Budaya Lokal Dalam Akuntabilitas Keuangan Gereja Kristen. . *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 601–619.

Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta.